

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada umumnya suatu Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Maka Pemerintah perlu mendapatkan dana tersebut dengan melakukan suatu pungutan kepada masyarakat yang lebih dikenal dengan kata pajak. Dalam APBN pada tahun 2023, pendapatan negara diperoleh sebanyak Rp.2.774,3 T, dimana sebagian besarnya diperoleh dari pajak yaitu sebesar Rp1.869,2 T. Berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2007, tentang ketentuan dan tatacara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat berbagai macam pajak di Indonesia.

Pajak di Indonesia terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kewenangan tersebut diharapkan pemerintah dapat mengelola keuangan daerahnya dengan lebih baik untuk pembiayaan dan pembangunan daerah melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Di Indonesia salah satu daerah dengan pendapatan asli daerah terbesar yaitu DKI Jakarta dengan pendapatan asli daerahnya pada tahun 2022 diperoleh sebanyak 2 Rp 45 T. Salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli daerah yaitu dari pendapatan pajak daerah yaitu sebanyak Rp40 T, penerimaan pajak pada DKI Jakarta terbesar yaitu

bersumber dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan pendapatan sebanyak Rp9 T, dan pajak terbesar setelahnya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan dengan pendapatan sebesar Rp8 T. Tingginya pendapatan pajak bumi bangunan pada DKI Jakarta disebabkan karena jumlah penduduknya yang tinggi, selain itu banyaknya pembangunan sehingga lahan semakin mengecil menyebabkan harga tanah semakin mahal. Mudahnya akses untuk membayarkan pajak juga membuat masyarakat lebih mudah dalam membayarkan pajak.

Walau tidak sebanyak pendapatan yang diterima pada DKI Jakarta, provinsi Sumatera Barat menerima pendapatan asli daerah pada tahun 2022 sebanyak Rp 2,8 T dengan pendapatan pajaknya sebesar Rp 2.2 T. Pada Provinsi Sumatera Barat penerimaan pajak terbesar yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu sebesar Rp 853M. Salah satu daerah di Sumatera Barat dengan pendapatan asli daerah terbesar adalah Kota Padang dengan pendapatan asli daerahnya pada tahun 2022 yaitu sebanyak Rp612 M dengan pendapatan pajaknya sebanyak Rp438 M. Pada Kota Padang pendapatan pajak terbesar yaitu dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp114 M dan pendapatan terbesar lainnya yaitu dari pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan yaitu sebesar Rp66 M. Kota Padang merupakan salah satu daerah yang berpotensi untuk dikembangkan. Dengan banyaknya pembangunan yang bisa dilakukan. Berdasarkan dari data pada Badan Pusat Statistik, penduduk di Kota Padang semakin meningkat setiap tahunnya dan juga terus terjadi pembangunan pada setiap aspek kegiatan. Salah satunya yaitu pembangunan pada bidang perumahan, pertokoan dan lain sebagainya. Dengan pertumbuhan penduduk dan banyaknya pembangunan perumahan tentu saja akan berdampak pada Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2). Dengan pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan PBB pada Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Kota Padang?
2. Bagaimana kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Bapenda kota padang?
3. Kendala apa saja yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
2. Untuk mengetahui kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Bapenda kota Padang
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi dalam pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1.4.1 Manfaat Bagi Pihak Lain Sebagai bahan untuk menambah wawasan dan sebagai bahan referensi dalam proses pembuatan tugas akhir selanjutnya

1.4.2 Manfaat bagi Instansi Sebagai bahan acuan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam pemungutan pajak dan meningkatkan kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada badan pendapatan daerah (Bapenda) kota padang

1.4.3 Manfaat Bagi Penulis

1. Untuk mendapatkan menambah wawasan dalam menghadapi dunia kerja
2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas
3. Untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu dari magang ini

## 1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota padang yang beralamat di Jl. Moh. Yamin No. 70, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota 5 Padang, Sumatera Barat. Dilakukan selama jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 2 bulan (40 hari kerja) terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2024

## 1.6 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang relevan serta dapat diuji kebenarannya, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi Keperpustakaan Penulis mencari dan mengumpulkan informasi dari sumber

artikel, buku-buku, laporan-laporan, dan sumber lain yang terkait dengan bahan permasalahan yang dikaji

2. Penelitian Lapangan Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan langsung dari instansi, penulis juga melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan observasi pada kegiatan operasional pada instansi
- b. Wawancara dengan karyawan dari instansi terkait
- c. Pengambilan data dari instansi tempat magang

### **1.7 Sistematika Penyusunan**

Sistematika penulisan adalah sebuah sistem untuk memberikan gambaran secara umum dalam penulisan tugas akhir, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat gambaran dari penelitian ini yang terdiri dari lima bab, yaitu:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan

- **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan landasan teori yang diperlukan dalam menunjang konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan peneliti. Pada bab ini dibahas tentang pajak daerah, kontribusi pajak daerah, PBB-P2

- **BAB III GAMBARAH UMUM INSTANSI PEMERINTAH**

Bab ini menguraikan tentang instansi yang terdiri dari, sejarah berdirinya instansi, visi dan misi, logo, dan struktur organisasi pada Badan Pendapatan Daerah kota Padang

- BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan hasil studi lapangan penulis mengenai kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Padang

- BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dari hasil pelaksanaan magang, serta berisikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya

